



PANGRIPTA 3 (1) 2020: 40–49

## PANGRIPTA

Jurnal Ilmiah Kajian Perencanaan Pembangunan

[jurnalpangripta.malangkota.go.id](http://jurnalpangripta.malangkota.go.id)



# EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM BIDANG EKONOMI PEMERINTAH KOTA MALANG

Riza Saadiah

Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kota Malang

---

**Abstrak:** Kajian ini dilatarbelakangi oleh perubahan program dari periode lama ke periode baru pemerintahan Kota Malang. Semangat utama kajian ini adalah menganalisis peta transisi program masing-masing urusan dari bentuk program yang lama ke program yang baru. Dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk dapat menghasilkan representasi dari kinerja program Bidang Ekonomi di Kota Malang sebagai landasan atau acuan pelaksanaan kinerja RPJMD Kota Malang periode tahun 2018-2023. Selain itu dokumen Evaluasi Kinerja Program Bidang Ekonomi juga merupakan rekomendasi terhadap Pemerintah Daerah Kota Malang, sebagai upaya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan Kota Malang. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik evaluasi model CIPP (*Context, Input, Process, and Product*). Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, penempatan indikator belum merepresentasikan program serta masih banyak keterbatasan data untuk menelaah lebih dalam dan lebih jauh.

**Kata kunci:** Evaluasi, Kinerja, Pembangunan Ekonomi.

---

**Abstract:** *This study is motivated by the change of the program from the old period to the new period of governance in Malang. The main spirit of this study is to analyze the program transition map of each matter from the old program to the new program. The implementation of this activity is to be able to produce a representation of the performance of the Economic Field program in Malang City as a basis or reference for the implementation of the performance of the RPJMD in the period 2018 Malang -2023. Besides that, the Performance Evaluation document for the Economy Program is also a recommendation to the Regional Government of Malang City, as an effort to effectively and efficiently implement the development of Malang City. Data analysis was performed using the CIPP (Context, Input, Process, and Product) model evaluation technique. Based*

**Korespondensi Penulis :**

Riza Saadiah, Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kota Malang  
Surel : [rizaadiah@yahoo.com](mailto:rizaadiah@yahoo.com)

*on the evaluation conducted, the placement of indicators does not represent the program and there are still many data limitations to examine deeper and further.*

**Keywords:** *Evaluation, Performance, Economic Development.*

## PENDAHULUAN

Dimensi waktu yang menunjukkan jangkauan dan capaian pembangunan melahirkan berbagai produk perencanaan pembangunan dengan orientasi yang berbeda, meliputi rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Pemerintah Kota Malang dalam melaksanakan proses pembangunan mengacu pada RPJMD Tahun 2018-2023, yang memiliki Visi pembangunan "Kota Malang Bermartabat". Untuk mewujudkan Visi tersebut dirumuskan 4 (empat) misi pembangunan daerah sebagai berikut:

- Misi 1 : Menjamin Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Layanan Dasar Lainnya Bagi Semua Warga
- Misi 2 : Mewujudkan Kota Produktif dan Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Kreatif, Keberlanjutan dan Keterpaduan
- Misi 3 : Mewujudkan Kota yang Rukun dan Toleran berasaskan Keberagaman dan Keberpihakan terhadap Masyarakat Rentan dan Gender
- Misi 4 : Memastikan Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah yang Tertib Hukum, Profesional dan Akuntabel.

Disahkan dan ditetapkannya RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023 secara tidak langsung sebagai penanda bahwa berakhirnya RPJMD Kota Malang periode sebelumnya yakni Tahun 2013-2018. Secara substantive, konten dari Rencana Pembangunan Jangka Mendengah Daerah menjelaskan penca-

paian Visi dan Misi Kepala Daerah dengan melalui pencapaian Tujuan, Sasaran, dan Program di level paling teknis dalam dokumen RPJMD. Tujuan, Sasaran, dan Program disusun secara sistematis sebagai sebuah aktifitas dalam mencapai cita-cita Kota Malang. Berarti secara logis dapat diasumsikan bahwa disaat cita-cita Kota Malang berubah dari periode Tahun 2013-2018 ke tahun 2018-2023 maka Tujuan, Sasaran, dan Program akan menyesuaikan atau merepresentasikan cita-cita Kota Malang yang baru. Kegiatan Evaluasi Kinerja Program Bidang Ekonomi di Kota Malang bertujuan sebagai kedudukan Pemerintah Kota Malang dalam melaksanakan program baru dalam periode RPJMD tahun 2018-2023. Dengan berubahnya program khususnya di Bidang Ekonomi maka yang perlu kita ketahui adalah peta transisi program masing-masing urusan dari bentuk program yang lama ke program yang baru. Selain itu, evaluasi kinerja program Bidang Ekonomi juga dapat memberikan rekomendasi terhadap Pemerintah Kota Malang secara realistis bagaimana program tersebut terlaksana pada periode sebelumnya, dan memahami konsekuensi logis dari perubahan program baru yang telah dicanangkan pada RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023.

Mengingat periodisasi pembangunan RPJMD telah berjalan sekitar satu tahun, maka jangkauan analisis evaluasi program yang dapat diidentifikasi adalah pada program yang sama atau pada indikator yang sama. Dengan demikian langkah strategis pertama adalah memetakan transisi program kemudian menyortir program atau indikator yang sama dengan periode sebelumnya. Langkah kedua melihat kinerja program atau

indikator tersebut terhadap *outcome* pembangunan daerah. Kemudian langkah terakhir memberikan rekomendasi terkait keberlanjutan penggunaan program, indikator maupun target yang dapat saja dirubah, ditambah maupun dikurangi

## METODE

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik evaluasi model CIPP. Model CIPP merupakan singkatan dari *Context, Input, Process, and Product*. Menurut Mulyaningsih (2011) evaluasi CIPP dikenal dengan nama evaluasi formatif dengan tujuan menentukan pengambilan keputusan dan perbaikan program, khususnya dalam pelaksanaannya. Penjelasan atas masing-masing aspek dalam model evaluasi CIPP adalah sebagai berikut:

### 1. Evaluasi *Context*

Evaluasi konteks (*context evaluation*) merupakan dasar dari evaluasi yang bertujuan menyediakan alasan-alasan (*rationale*) dalam penentuan tujuan (Baline R. Worthern & James R Sanders, 1979). Evaluasi konteks memberikan informasi bagi pengambil keputusan dalam perencanaan suatu program yang akan *on going*. Selain itu, konteks juga bermaksud bagaimana rasionalnya suatu program. Analisis ini akan membantu dalam merencanakan keputusan, menetapkan kebutuhan dan merumuskan tujuan program secara lebih terarah dan demokratis

### 2. Evaluasi *Input*

Evaluasi input (*input evaluation*) merupakan evaluasi yang bertujuan menyediakan informasi untuk menentukan bagaimana menggunakan sumberdaya yang tersedia dalam mencapai tujuan program. Evaluasi input meliputi analisis *personal* yang berhubungan dengan bagaimana penggunaan sumber-sumber

yang tersedia, alternatif-alternatif strategi yang harus dipertimbangkan untuk mencapai suatu program.

### 3. Evaluasi Proses (*Process Evaluation*)

Evaluasi yang dirancang dan diaplikasikan dalam praktik implementasi kegiatan disebut dengan evaluasi proses. Untuk melihat apakah pelaksanaan program sudah sesuai dengan strategi yang telah dilaksanakan tersebut, maka perlu diadakannya evaluasi. Evaluasi tersebut dinamakan evaluasi proses. Evaluasi proses termasuk mengidentifikasi permasalahan prosedur pada pelaksanaan kejadian dan aktivitas. Tujuan evaluasi proses yaitu untuk mengidentifikasi atau memprediksi dalam proses pelaksanaan, seperti cacat dalam disain prosedur atau implementasinya (Badrujaman, 2009). Selanjutnya dijelaskan pula bahwa evaluasi proses juga bertujuan untuk menyediakan informasi sebagai dasar memperbaiki program, serta untuk mencatat, dan menilai prosedur kegiatan dan peristiwa.

### 4. Evaluasi Produk (*Product Evaluation*)

Evaluasi produk adalah evaluasi yang bertujuan untuk mengukur, menginterpretasikan dan menilai pencapaian program (Stufflebeam & Shienfield, 1985). Evaluasi produk adalah evaluasi mengukur keberhasilan pencapaian tujuan. Evaluasi dapat juga bertujuan mengumpulkan deskripsi dan penilaian terhadap iuran (*outcome*) dan menghubungkan itu semua dengan objektif, konteks, input, dan informasi proses, serta untuk menginterpretasikan kelayakan dan keberhargaan program. Evaluasi produk dapat dilakukan dengan membuat definisi operasional dan mengukur kriteria pengukuran yang telah dicapai (objektif), melalui pengumpulan nilai dari stakeholder, dengan unjuk rasa (*performing*) baik dengan menggunakan analisis

secara kuantitatif, maupun kualitatif (Trotter et al., 1998).

Dalam pelaksanaan analisis, proses analisis data dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

#### 1. Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data ini yang dilakukan ada dua metode yang dipakai secara terpadu yaitu observasi, wawancara, dan studi dokumentasi.

#### 2. Reduksi Data Analisis

Reduksi data dilakukan guna menajamkan, menggolongkan data sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik atau diverifikasi. Data yang diperoleh langsung ditulis dengan rinci dan sistematis setiap selesai mengumpulkan data. Kemudian informasi/dokumen dipilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus kajian agar mudah untuk menyimpulkannya. Reduksi data dilakukan untuk mempermudah dalam mencari kembali data yang diperoleh bila diperlukan.

#### 3. Display Data atau Penyajian Data

Display data dilakukan dengan mengumpulkan data atau informasi secara tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data yang sudah ada disusun dengan menggunakan teks yang bersifat naratif dan teks dialog.

#### 4. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi

Dalam penarikan kesimpulan, pelaksana mengkaji semua data yang dikembangkan menjadi informasi penting dari OPD/instansi, yang terkait dengan implementasi program, sehingga kemudian menjadi kesimpulan yang kuat sebagai hasil akhir kajian.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut pembahasan hasil kajian disajikan berdasarkan urusan:

#### 1. Urusan Pendidikan

Secara garis besar pelaksanaan urusan Pendidikan dan kebudayaan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan kebudayaan (Tahun Perencanaan 2013-2019) sejauh ini masih banyak data yang belum terinventarisir, sehingga masih diperlukan tindak lanjut untuk kegiatan pemenuhan data.

Adanya Transisi perencanaan jangka menengah daerah yang kemudian diikuti pula dengan transisi kelembagaan dan perencanaan OPD penyelenggaraan urusan mengakibatkan Urusan Pendidikan dan kebudayaan dilebur menjadi satu. Dimana program urusan Pendidikan sebelumnya terdapat 5 program kini menjadi 3 program ditambah dengan 1 program urusan kebudayaan, sehingga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang kini mengampu total 4 program untuk 2 urusan. Secara umum belum banyak isu yang bisa diperoleh, karena pertimbangan data yang belum tersedia, sehingga belum banyak diperoleh temuan terkait pelaksanaan urusan Pendidikan dan kebudayaan.

#### 2. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Secara garis besar pelaksanaan urusan Kepemudaan dan Olahraga yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Tahun Perencanaan 2013-2019) sudah terpenuhi keseluruhan data realisasinya.

Adanya Transisi perencanaan jangka menengah daerah yang kemudian diikuti pula dengan transisi kelembagaan dan perencanaan OPD penyelenggaraan urusan mengakibatkan Urusan Kepemudaan dan Olahraga selanjutnya bergabung dengan Urusan pariwisata. Sedangkan program yang awalnya terdapat 5 program pada urusan kepemudaan dan olahraga disederhanakanlah menjadi 2 program.

Secara umum jika dijelaskan Isu dalam pelaksanaan urusan kepemudaan dan olahraga adalah kaitannya dengan indikator program terutama pada 2 program baru dimana

setelah adanya restrukturisasi maupun peleburan terdapat beberapa prinsip utama dalam pembangunan kepemudaan yang menjadi hilang diantaranya pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, dll, yang mana beberapa prinsip ini menjadi tidak terepresentasikan pada indikator 2 program baru tersebut.

Direkomendasikan untuk mempertimbangkan kembali guna memunculkan indikator yang berkaitan dengan prinsip pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda karena diharapkan pelayanan yang diberikan pada urusan ini mampu menumbuhkan patriotisme, dinamika, budayaprestasi, dan semangat profesionalitas; tidak hanya terkunci pada partisipasi dan peran aktif pemuda saja.

### 3. Urusan Lingkungan Hidup

Sebagian besar pencapaian kinerja menunjukkan capaian positif, hanya Persentase Kemitraan/Kerjasama yang terjalin dengan Dinas Lingkungan Hidup yang menunjukkan penurunan signifikan.

Analisis *trend* tidak dapat dilakukan secara optimal karena data yang tersedia hanya 2 tahun, sementara untuk melihat pola pergerakan capaian kinerja minimal 3 tahun.

Untuk data-data yang terlanjur tidak ada pada tahun 2014 sampai 2016, agar dapat dimaksimalkan data capaian 2019 minimal sampai dengan triwulan 3.

Terkait indikator kinerja yang berada pada dua program berbeda sebaiknya salah satunya dihilangkan saja.

### 4. Urusan Kesehatan

Hanya 8 program yang menunjukkan capaian kinerja yang tidak maksimal, artinya mayoritas kinerja pada urusan kesehatan telah optimal.

Pada program-program baru, terlalu banyak indikator yang sampai 2018 tidak

tersedia data, sehingga meskipun diupayakan untuk memperoleh data pada tahun 2019 sampai pada triwulan ke tiga tetap belum maksimal menunjukkan trend dan gambaran pencapaian.

Pertimbangkan kembali penggunaan indikator yang tidak dapat menunjukkan data kinerja sampai 2018.

Terkait indikator kinerja yang berada pada dua program berbeda sebaiknya salah satunya dihilangkan saja.

### 5. Urusan Perhubungan

Secara umum pelaksanaan urusan perhubungan dalam tahun perencanaan 2014-2018 terdapat 2 program yang terpenuhi datanya dengan satu indikator yang sama sedangkan 4 program belum dapat terpenuhi datanya.

Urusan perhubungan dalam tahun perencanaan 2019-2023 terdapat 4 program baru yang belum dapat terpenuhi datanya

Pada program baru terdapat 2 program dengan 1 indikator yang sama yaitu program pengelolaan perpustakaan dan program BLUD pelayanan parkir dengan indikator

Kontribusi retribusi pelayanan parkir terhadap PAD.

Pada program baru tahun perencanaan 2019-2023 terdapat 2 program yang relatif sama dengan indikator yang sama, yakni Program Pengelolaan Perpustakaan dan Program BLUD Pelayanan Parkir. Sebagai saran peneliti sebaiknya kedua program ini dikurcutkan, apabila dalam pelayanan akan melalui BLUD maka program pengelolaan perpustakaan di hapuskan, sebaliknya jika dalam pelayanan perpustakaan dikelola sendiri oleh dinas maka program BLUD pelayanan perpustakaan dapat dihapus. Sedangkan dalam realisasinya keduanya tidak bisa di hapus maka rekomendasi akhir adalah indikatornya dibedakan atau diperjelas sehingga kedua program dapat diketahui capaian realisasinya dengan indikator yang efektif.

## 6. Urusan Perpustakaan

Secara garis besar pelaksanaan urusan perpustakaan dan kearsipan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah (Tahun Perencanaan 2013-2019) belum semua data yang terpenuhi, masih terdapat data yang belum memiliki angka capaian yaitu terkait Program Pelestarian dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan dan Program Pengelolaan Arsip Daerah.

Secara umum isu dalam pelaksanaan urusan Perpustakaan dan Kearsipan adalah kaitannya dengan indikator program yang digunakan terutama pada Program Pelestarian dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan dan Program Pengelolaan Arsip Daerah.

Direkomendasikan untuk mempertimbangkan merubah indikator pada program Program Pelestarian dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan dan Program Pengelolaan Arsip Daerah. Dimana indikator "Persentase peningkatan koleksi yang terdigitalisasi" dirasa kurang tepat sehingga cukup jika dirubah menjadi "Persentase koleksi yang terdigitalisasi" tidak hanya terpaku pada persentase peningkatan tiap tahunnya melainkan terhadap seluruh koleksi eksemplar yang ada.

Mempertimbangkan untuk merubah indikator program Program Pengelolaan Arsip Daerah dari yang sebelumnya adalah Persentase peningkatan dokumen arsip yang dikelola sesuai kaidah kearsipan, menjadi "Persentase dokumen arsip yang dikelola sesuai kaidah kearsipan" menghilangkan kata "Peningkatan" agar perhitungan tidak hanya didasarkan oleh besaran peningkatan melainkan kepada jumlah keseluruhan arsip yang ada.

Indikator Persentase peningkatan koleksi yang terdigitalisasi agar lebih representative terhadap tujuan dari indikator tersebut maka disarankan definisi operasional dirubah menjadi:

$$\frac{????}{??} \times 100$$

## 7. Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Hal yang sangat penting dan perlu dicermati adalah penetapan definisi operasional yang kurang tepat. Sehingga hasil capaian tidak betul-betul merepresentasikan kinerja pelaksanaan program tersebut. Selain itu masih banyak data-data yang seharusnya mudah untuk disediakan, namun tidak tersedia.

Memperbaiki kembali definisi operasional seperti indikator yang telah ditetapkan, dan kemudian hitung ulang sesuai dengan data eksisting yang tersedia.

Mempertimbangkan untuk mengganti indikator program Persentase Peningkatan Produksi Pertanian dengan Persentase Peningkatan Produktifitas Pertanian. Dengan asumsi wilayah Kota Malang dengan tipologi perkotaan dengan luas lahan pertanian yang sempit dan semakin menyempit setiap tahunnya, isu terbesar dalam sektor pertanian adalah efisiensi melalui peningkatan produktifitas.

Berikut merupakan rekomendasi revisi terhadap target yang telah ditetapkan di RPJMD. Titik tekannya adalah bahwa dalam penetapan target, selayaknya progresif setiap tahunnya.

## 8. Urusan Pertanian

Secara umum pelaksanaan urusan pertanian mengalami transisi, khususnya pada pelaksanaan program pembangunannya dari yang awalnya 4 program menjadi 2 program dalam perencanaan tahun 2019-2023. Dari total 4 program lama dengan 5 indikator program, 3 indikator diantaranya digunakan dalam program baru yakni Program Peningkatan Peternak dan Kesehatan Hewan. Sedangkan 1 program sisanya meng-

ganti indikator yang terfokus dalam produksi pertanian, dari indikator yang sebelumnya adalah produktifitas pertanian.

Merujuk terhadap target indikator program baru yang ditetapkan di RPJMD, mayoritas target masih ditetapkan cenderung pesimis. Sebagai contoh indikator Persentase Peningkatan Produksi Pertanian ditetapkan target capaian rata 2% setiap tahun dari 2019-2023. Padahal merujuk rata-rata capaiannya, dapat disimpulkan rata-rata pertumbuhan produksi pertanian adalah diangka 2,86. Bahkan pada tahun 2018, pertumbuhan hingga mencapai 25,11

### 9. Urusan Pangan

Data secara keseluruhan pangan utama tidak tersedia. Data yang tersedia adalah rincian ketersediaan pangan utama ditahun 2017 dan 2018. Untuk menggambarkan kebutuhan akan ketersediaan pangan utama yang satu dengan lainnya tidak saling menggantikan, alangkah lebih baiknya penetapan indikator dan targetnya diperinci per jenis pangan utamanya

### 10. Urusan Perindustrian

Secara umum pelaksanaan urusan perindustrian yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian (Tahun Perencanaan 2013-2019) dari 8 program hanya terdapat 4 program yang disertai dengan data realisasi, sedangkan 4 program sisanya tidak memiliki data-nya.

Transisi perencanaan jangka menengah daerah yang kemudian diikuti pula dengan transisi kelembagaan dan perencanaan OPD penyelenggaraan urusan mengakibatkan bergabung urusan perindustrian dengan Urusan Koperasi UM dan Urusan Perdagangan. Sedangkan program yang awalnya terdapat 8 program disederhanakanlah menjadi 2 program.

Secara keseluruhan, isu terbesar dari pelaksanaan urusan perindustrian adalah

kaitannya dengan penetapan Indikator Program yang notabeneinya sebagai representasi dari kinerja penyelenggaraan urusan. Hal tersebut ditunjukkan dari indikator 2 program barunya yang mana tidak konsisten antara indikator dengan definisi operasional, maupun indikator yang dirasa kurang merepresentasikan peran seharusnya. Untuk Program Pengembangan Industri dengan indikator Persentase Peningkatan Jumlah IKM, hal yang perlu di perhatikan sebagai saran dari peneliti adalah mengkonsistensikan indikator kinerja yang digunakan dimana indikator program secara tersurat menyebutkan Persentase Peningkatan Jumlah IKM, namun yang dihitung sebagai definisi operasional dari indikator tersebut adalah seluruh pelaku industri.

Dalam rangka penetapan target RPJMD tahun 2019-2023, target cenderung di tetapkan stagnan, untuk itu selayaknya target harus ditetapkan progresif setiap tahunnya.

### 11. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dari total program lama terdapat 8 program yang disertai data sedangkan 9 program sisanya tidak memiliki data Pada program baru dengan total 5 program terdapat 7 indikator dari 4 program yang disertai data sedangkan 6 indikator dalam 4 program tersebut tidak tersedia data. untuk Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Infrastruktur Saluran Air Limbah memiliki satu indikator dimana indikator tersebut tidak tersedia datanya.

### 12. Urusan Penanaman Modal

Secara umum pelaksanaan urusan penanaman modal pada masa perencanaan 2013-2018 memiliki 2 indikator utama yaitu Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Persentase Peningkatan Nilai Penanaman Modal dan Investasi Daerah hanya saja pada bebe-

rapa tahun dalam kurun waktu tersebut kedua indikator ini dilaksanakan oleh program yang memiliki perbedaan nomenklatur setiap tahunnya.

Transisi perencanaan jangka menengah daerah yang kemudian diikuti pula dengan transisi kelembagaan dan perencanaan OPD penyelenggaraan urusan mengakibatkan bergabungnya urusan penanaman modal dan urusan tenaga kerja. Sedangkan program yang awalnya terdapat 9 program disederhanakanlah menjadi 4 program pada urusan penanaman modal.

Secara keseluruhan, isu terbesar dari pelaksanaan urusan perindustrian adalah kaitannya dengan ketidak sesuaian penetapan target dan realisasi kinerja terutama pada program dengan indikator Persentase Peningkatan Nilai Penanaman Modal dan Investasi Daerah yang mana realisasiya sangat jauh melampaui target yang ditentukan sehingga perlu dilakukan evaluasi terkait penentuan program ataupun kesalahan dalam definisi operasional perhitungan realisasi capaian program tersebut.

Pada Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi dan Program Pengendalian, Promosi Penanaman Modal dan Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan indikator Persentase Peningkatan Nilai Penanaman Modal dan Investasi Daerah perlu dilakukan perbaikan terkait penentuan target kinerja indikator tersebut hal ini dikarenakan indikator yang sama juga digunakan pada program baru pasca peleburan urusan yaitu terdapat pada Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan indikator yang hamper sama yaitu Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah, oleh sebab itu penentuan target kinerja yang lebih optimistis sangat diperlukan mengingat pada program lama capaian indikator ini tercapai jauh diatas target yang ditentukan.

### **13. Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman**

Pelaksanaan urusan perumahan dan kawasan pemukiman yang dilaksanakan oleh dinas perumahandan kawasan pemukiman (tahun perencanaan 2013-2018) dari 6 program hanya terdapat 4 program yang berstatus tersedia datanya, namun dengan catatan pada tahun 2017-2018 saja karena pelaksanaan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman baru dilaksanakan sejak tahun 2017 Program baru urusan perumahan dan kawasan pemukiman tahun perencanaan 2019-2023 terdapat satu program dengan tiga indikator yang berstatus tidak tersedia data untuk tahun 2014-2018.

Program Penataan Perumahan dan kawasan permukiman yang dilaksanakan tahun perencanaan 2019-2023 memiliki 3 indikator. 2 indikator diantaranya memiliki variabel perhitungan yang berbanding terbalik. Sebagai saran dari peneliti agar indikator ini di sederhanakan menjadi satu indikator yakni persentase pelayanan rumah layak huni agar lebih mudah di capai, efisien, jelas dan mudah dipahami.

### **14. Urusan Pariwisata**

Secara garis besar pelaksanaan urusan pariwisata yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Tahun Perencanaan 2013-2019) masih belum terinventarisir seluruhnya, sehingga masih perlu dilakukan tindak lanjut penggalian data.

Adanya Transisi perencanaan jangka menengah daerah yang kemudian diikuti pula dengan transisi kelembagaan dan perencanaan OPD penyelenggaraan urusan mengakibatkan Urusan Pariwisata selanjutnya bergabung dengan Kepemudaan dan Olahraga.

Secara umum jika dijelaskan Isu dalam pelaksanaan urusan ini masih belum banyak yang tergal, karena masih banyak keterba-

atasan data yang diperoleh, sehingga masih memerlukan tindak lanjut, tetapi terdapat temuan terkait definisi operasional indikator program yang dirasa masih kurang tepat, sehingga direkomendasikan untuk di lakukan perbaikan.

Direkomendasikan untuk memperbaiki definisi operasional dalam menghitung indikator Program Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata, dengan indikator yaitu "Persentase destinasi wisata yang dibina", indikator ini memiliki definisi operasional  $\text{Jumlah Destinasi Yang di Bina} / 57 \times 100\%$  direkomendasikan dirubah menjadi  $\text{Jumlah Destinasi Yang di Bina} / \text{keseluruhan jumlah destinasi wisata} \times 100\%$

Direkomendasikan untuk memperbaiki definisi operasional program Pemasaran Pariwisata dan Pengembangan Ekonomi Kreatif dengan indikator Persentase pemasaran Pariwisata, dengan definisi operasional yaitu "Tahun Berjalan --  $(N-1) / (N-1) \times 100\%$ " direkomendasikan untuk dirubah menjadi "jumlah event promosi pariwisata (yang tersedia/memungkinkan) dibandingkan dengan keikutsertaan Kota Malang dalam memasarkan pariwisatanya pada event tersebut kemudian selanjutnya untuk dipresentasikan"

### 15. Urusan Perikanan

Secara umum pelaksanaan urusan perikanan di Kota Malang mengalami transisi, baik dalam pelaksanaan programnya maupun kelembagaannya. Namun tidak ada perubahan yang cukup signifikan, yang mana hanya perubahan dari sebelumnya 2 program dengan 2 indikator menjadi 1 program dengan 1 indikator yang sama dengan indikator lama.

Meskipun mengalami pertumbuhan yang konsisten setiap tahunnya, namun yang perlu dijadikan catatan adalah fluktuasi pertumbuhan yang tidak stabil yang mana tumbuh cukup signifikan ditahun 2015 dan 2016, namun melambat cukup drastis.

### KESIMPULAN

Dengan memperhatikan analisis perurusan terhadap kinerja program Kota Malang, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mayoritas data tidak tersedia pada tahun 2018 dan 2019, sehingga sedikit sulit untuk menganalisis trend capaian kinerja;
2. Sebagian besar indikator tidak representatif, artinya ukuran yang melekat pada indikator tidak dapat merepresentasikan kinerja program;
3. Beberapa indikator dilekatkan pada beberapa program berbeda;

### SARAN

Adapun saran dengan berdasarkan pada temuan di kesimpulan di atas adalah sebagai berikut:

1. Menginfentarisir data dengan baik. Sistem pemrolehan dan direktori data perlu ditingkatkan;
2. Melakukan penyesuaian terhadap indikator-indikator yang tidak representatif terhadap program;
3. Menyesuaikan angka target pada program yang kinerjanya telah jauh melampaui target;
4. Menyempurnakan definisi operasional.

### DAFTAR PUSTAKA

- Kristiadi, J.B.1994. Administrasi/Manajemen Pembangunan. Sub bagian Tata Usaha Jakarta.
- Mangkunegara, Anwar Prabu. 2005. Evaluasi Kinerja. Bandung: Refika Aditama
- Simanjuntak, Payaman J. 2005. Manajemen dan Evaluasi Kerja. Lembaga Penerbit FEUI, Jakarta.
- Wirawan. (2009). Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia. Jakarta : Salemba Empat, Jakarta.
- Winarno. 2012. Kebijakan Publik, Teori, Proses, dan Studi Kasus edisi & Revisi Terbaru. CAPS. Yogyakarta.
- Arikunto, Suharsini. 2004. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek. Bandung: Rineka Cipta
- Chelimsky, Elanor. 1989. Program Evaluation: Pattern and Directions, 2nd Edition. Wash-

- ington, DC; American Society for Public Administration
- Panduan Pelatihan Monitoring dan Evaluasi Partisipatif (TM 6), DitjenNak (GoI) / DfID (UK), Makassar, 2000
- Laporan Pelatihan PME di Bulukumba, Makasar, Manado dan Jakarta, DELIVERI, 1997, 1998, 1999
- Panduan Pelatihan Manajemen Daur Proyek dan Penggunaan Kerangka Kerja Logis (TM2), DitjenNak (GoI) / DfID (UK), Makassar, 2000
- Laporan PME oleh Kelompok 20 Direktorat Jenderal Peternakan -2000
- Case, D'Arcy Davis. 1990. "The Idea, Methods and Tools for Participatory Assessment, Monitoring and Evaluation in Community Forestry." The Community's Toolbox. FAO, Rome, 1990.
- FAO-APAN and FARM (R. Fithriadi). 1996. Summary Report of the Training Exercise on Farmer-level Planning, Monitoring and Evaluation, 27 August - 2 September 1995, North Sumatra, Indonesia. Farm Insight Report No. 22. Food and Agriculture Organisation of the United Nations.
- Gujit, Irene; Mae Arevalo and Kiko Saladores. 1998. "Tracking change together" in PLA Notes 31, February 1998. IIED pp. 28-36
- IDS. 1998. "Participatory Monitoring & Evaluation: Learning From Change" in IDS Policy Briefing Issue 12: Nov 1998, Institute of Development Studies.
- INTRAC. 1997. Handouts INTRAC Training Course on Managing a Participatory Monitoring and Evaluation Process, 22nd - 26th September 1997, Oxford, UK. Jobs, Katja. 1997. "Participatory Monitoring and Evaluation Guidelines: Experience in the Fields. St Vincent and the Grenadines". Social Development Division Dissemination Note No.1. Department for International Development, UK.
- Marsden, D., Oakley, P., and Pratt, B. 1994. "Measuring the Process: Guidelines for Evaluating Social Development." INTRAC. Oakley, P. & Marsden, D. 1990. "Evaluating Social Development" Oxfam.
- Wegwood, H. and Alex Bush. 1996. "ITDG's Experience of Participatory Evaluation Oriented Monitoring Systems (POEMS) in the International Food Production Programme." INTRAC's 3rd International Workshop on the Evaluation of Social Development, November 1996, The Netherlands.
- Iwasilah, et al. (1996). Glossary of educational Assessment Term. Jakarta: Ministry of Education and Culture.
- Arikunto, S & Jabar. 2004. Evaluasi Program Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara Wayan Nurkencana. Evaluasi Pendidikan. Surabaya: Usaha Nasional